

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1206 K/Pdt/2024, tanggal 24 April 2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2560 K/Pdt/2023, tanggal 2023.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3555 K/Pdt/2018, tanggal 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2596 K/Pdt/2008, tanggal 14 September 2009.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad Redi dan Ibnu Sina Chandranegara (eds.). *Segi Hukum Terhadap Implikasi Teknologi Digital*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

J.H. Nieuwenhuis. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Diterjemahkan oleh Djasadin Saragih. Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.

J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

M.A. Moegni Djojodirdjo. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

- Mas Achmad Santosa. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cetakan ke-3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ke-9. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan ke-6. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- S.F. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sri Soemantri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perutangan Bagian B*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-23. Jakarta: PT Intermasa, 2005.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-41. Jakarta: Pradnya Paramita, 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Cetakan ke-3. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Yusuf Shofie. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abenov, Yerlan dan Nailya Jaksybekova. "Citizen Lawsuits and the Accountability of Public Officials." *International Journal of Law and Public Administration*. Vol. 3, No. 1 (2020): 40-52.

Ditha Wiradiputra. "Analisis Yuridis Tindakan *Debt Collector* dalam Penagihan Hutang Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Privat*. Vol. 4, No. 1 (2021): 15-30.

Nadia Candra Sari. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2, No. 2 (2019): 130-145.

D. Laporan dan Dokumen Resmi

Otoritas Jasa Keuangan. *Bijak Ber-FinTech: Informasi dan Panduan Penggunaan Layanan Keuangan Digital*. Jakarta: OJK, 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2020*. Jakarta: OJK, 2021.

E. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024." Diakses pada 10 April 2026. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Data dan Statistik Fintech Lending." Diakses pada 2024. <https://www.ojk.go.id>.